

Pemprov Kalsel Mulai Antisipasi Karhutla 2020



<http://infopublik.id/kategori/nusantara/459336/pemprov-kalsel-mulai-antisipasi-karhutla-2020>

Guna mempercepat penanganan Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel melaksanakan Rapat koordinasi Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan 2020 di gedung Idham Chalid, Banjarbaru. Dalam rapat tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Abdul Haris, TNI dan Polri serta jajaran Kepala SKPD Lingkup Kalsel. Abdul Haris mengatakan, rakor ini dalam rangka antisipasi Karhutla di banua. Perlu ada langkah langkah strategis dalam penanganan karhutla seperti menyosialisasikan tentang larangan membakar hutan dan lain-lain. Apalagi mengingat saat ini, kata dia, dihadapkan pada persoalan pandemi Covid, tentu penanganannya harus sesuai dengan protokol kesehatan.

Dia mengatakan, seperti yang telah diarahkan gubernur, penanganan karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, para petugas di bidang kehutanan perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam antisipasi karhutla 2020. Plt Kepala BPBD Kalsel Hanif Faisol Nurrofiq mengatakan, berdasarkan prediksi Badan

Meteorologi Glimakologi dan Geofisika (BMKG) Kalsel, musim kemarau diprediksi berlangsung pada Juli mendatang. Tetapi, curah hujan masih turun di beberapa daerah seperti Kabupaten Tanah laut. Secara umum hujan masih ada di awal Juli. Tetapi sudah memasuki musim kemarau, sesuai dengan kriteria curah hujan di bawah 150 milimeter per bulan.

Saat ini pihaknya tengah memanfaatkan waktu untuk memetakan titik-titik yang rawan terjadi kebakaran, seperti pada lahan gambut di sekitar Bandara yang perlu diwaspadai. Daerah sekitaran bandara perlu adanya antisipasi bahaya yang biasanya muncul saat kebakaran. Menurut dia, langkah awal yang memungkinkan untuk dilaksanakan yaitu merendam kembali lahan rawa. “Dengan skenario 2019 kemarin kita telah mengalokasikan dana Rp3 miliar di PUPR, membuat saluran air untuk merendam 2.000 hektare lahan yang terbakar seperti di daerah Liang Anggang, hutan lindung dan Guntung Damar.

Sumber Berita:

1. <http://infopublik.id>, Pemprov Kalsel Mulai Antisipasi Karhutla 2020.
2. <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id>, Prediksi Awal Kemarau, Pemprov Kalsel Mulai Antisipasi Karhutla 2020.

Catatan:

🌳 Definisi Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja.

🌳 Tugas dan Fungsi

1. KLHK:

Mengingat KLHK adalah gabungan kehutanan dan lingkungan tugas baru ditambah untuk menangani kebakaran di lahan selain kawasan hutan, memberikan sanksi kepada pemegang izin usaha bila tidak memiliki SDM, sarpras dan tidak melaksanakan pengendalian kebakaran, koordinator pemulihan lingkungan hidup akibat Karhutla, meningkatkan koordinasi dan memberikan bantuan teknis untuk kerja sama regional dan internasional yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup akibat Karhutla;

2. Menristekdikti:

penambahan tugas kementerian di bidang pendidikan tinggi sehingga tugas terkait Karhutla adalah mengupayakan langkah agar proses kegiatan pendidikan tidak terganggu dengan penyediaan bantuan dana bagi masyarakat yang terkena dampak Karhutla, dan mendayagunakan para dosen dan mahasiswa fakultas kedokteran berpartisipasi membantu penanganan masalah kesehatan di daerah terkena dampak Karhutla;

3. Gubernur:

mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian Karhutla, melaporkan pelaksanaan pengendalian Karhutla ke Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan- Penambahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Sosial, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BMKG Perubahan secara mendasar terkait penambahan jumlah institusi yang dilibatkan. Institusi-institusi yang baru dimasukkan ini terkait peran dan fungsinya dalam rangka menata aspek sosial terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Selain itu terkait dengan konflik lahan maupun pembangunan infrastruktur. Akan tetapi yang terkait dengan pembangunan desa belum termasuk dalam institusi pemerintah yang terlibat dalam pengendalian Karhutla. Secara mendasar bahwa ke depan untuk pengendalian Karhutla yang berkelanjutan semetinya melibatkan pemerintahan desa.